



PERAN MANAJEMEN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Anggi Anggeriani Br Ketaren, Vania Khairunisa lubis, Muhammad Ikhsan Harahap

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: anggianggeriani87@gmail.com, vaniakhairunisalubis@gmail.com,
mhdikssanh@gmail.com

***Abstract** This study aims to analyze how Islamic bank financing management contributes to sustainable development through the integration of sharia principles, environmental responsibility, and social welfare. Using a qualitative descriptive method based on literature synthesis, regulatory documents, and secondary data on sustainable financing and national emission trends, this study examines the implementation of financing practices at Bank Syariah Indonesia (BSI) and the role of green financing in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). The results indicate that Islamic financing management significantly supports SDGs through inclusive financing, green financing allocations, environmental impact assessments, and digital transformation that enhances efficiency and reduces carbon footprints. The findings also show that BSI's sustainable financing reached Rp 41.91 trillion in 2022, while national CO₂ intensity remained in the range of 47–57 Mt, highlighting the urgency for Islamic banks to strengthen their contribution to climate mitigation. Overall, Islamic financing management plays a strategic role in promoting economic growth, social equity, and environmental sustainability in alignment with maqasid shariah.*

***Keywords:** Islamic bank financing, sustainable development, green financing, SDGs, sharia finance*

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana manajemen pembiayaan bank syariah berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan melalui integrasi nilai-nilai syariah, tanggung jawab lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang disusun berdasarkan sintesis literatur, dokumen regulasi, serta data sekunder mengenai pembiayaan berkelanjutan dan tren emisi nasional. Fokus pembahasan diarahkan pada implementasi pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI) serta peran green financing dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan syariah memberikan kontribusi signifikan terhadap SDGs melalui pembiayaan inklusif, alokasi pembiayaan hijau, penerapan evaluasi dampak lingkungan, dan transformasi digital yang mampu menurunkan jejak karbon. Data menunjukkan bahwa pembiayaan berkelanjutan BSI mencapai Rp 41,91 triliun pada tahun 2022, sedangkan intensitas emisi CO₂ Indonesia berada pada kisaran 47–57 Mt, yang mengindikasikan perlunya perbankan syariah memperkuat perannya dalam mitigasi iklim. Secara keseluruhan, manajemen pembiayaan syariah berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan sosial, dan keberlanjutan lingkungan yang selaras dengan maqasid al-syariah.

Kata kunci: pembiayaan syariah, pembangunan berkelanjutan, green financing, SDGs, perbankan syariah.

PENDAHULUAN

Perbankan syariah memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kemaslahatan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Manajemen pembiayaan dalam perbankan syariah memainkan peran penting dalam mengarahkan alokasi dana ke sektor-sektor produktif, etis, dan ramah lingkungan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun dalam praktiknya, pembiayaan syariah masih menghadapi sejumlah tantangan seperti kesenjangan kompetensi sumber daya manusia, keterbatasan

inovasi produk hijau, dominasi akad berbasis jual beli, serta tingkat literasi masyarakat yang masih rendah terhadap pembiayaan berkelanjutan. Di sisi lain, pertumbuhan green financing dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan sektor berkelanjutan membuka peluang baru bagi bank syariah untuk memperkuat kontribusinya terhadap SDGs.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berangkat dari pertanyaan mengenai bagaimana manajemen pembiayaan bank syariah dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, bagaimana implementasi pembiayaan syariah berkontribusi terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta sejauh mana kebijakan dan praktik pembiayaan bank syariah mampu mendukung pencapaian SDGs. Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara keuangan syariah dan pembangunan berkelanjutan, seperti studi Dewi (2023), Waharini (2020), dan Alifa (2023) yang menyoroti peran keuangan syariah dalam mendukung energi terbarukan, pemberdayaan UMKM, dan mitigasi perubahan iklim. Namun, penelitian mengenai integrasi manajemen pembiayaan, green financing, dan implementasi SDGs secara komprehensif masih perlu diperdalam, sehingga penelitian ini memiliki relevansi ilmiah yang kuat. (Yusuf, 2024)

KAJIAN TEORI

Konsep Manajemen Pembiayaan Bank Syariah

Manajemen pembiayaan dalam bank syariah merupakan proses pengelolaan dana yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan secara terpadu terhadap aktivitas pembiayaan agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tujuan kemaslahatan. Dalam Islam, kegiatan pembiayaan tidak sekadar menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga sarana untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, manajemen pembiayaan harus berorientasi pada keseimbangan antara keuntungan finansial, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam.

Pembiayaan syariah beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, prinsip jual beli seperti *murabahah*, *salam*, dan *istisna'*, serta prinsip sewa seperti *ijarah*. Setiap akad memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal pembagian risiko dan keuntungan. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, bank syariah tidak hanya menyalurkan dana untuk kegiatan yang menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa pembiayaan tersebut memberikan manfaat sosial, mendorong produktivitas masyarakat, dan memperkuat sektor riil.

Manajemen pembiayaan yang baik akan memastikan dana ditempatkan pada sektor-sektor yang mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, seperti pembiayaan usaha mikro dan kecil, proyek pertanian, energi terbarukan, serta kegiatan usaha yang berorientasi lingkungan. Selain itu, pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan pembiayaan dilakukan untuk menghindari praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti adanya unsur riba, gharar, dan maysir. Dengan pengelolaan yang profesional, transparan, dan beretika, bank syariah mampu menjadi lembaga keuangan yang tidak hanya stabil secara ekonomi, tetapi juga

memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan sosial dan keberlanjutan lingkungan. (Sofiyana, 2025)

Prinsip Syariah dan Keuangan Berkelanjutan

Prinsip syariah dalam sistem keuangan Islam berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam setiap aktivitas ekonomi. Sistem ini menolak segala bentuk *riba* atau bunga karena dianggap menciptakan ketimpangan antara pihak pemilik modal dan pengguna dana. Selain itu, prinsip syariah juga menghindari ketidakpastian berlebihan atau *gharar*, serta melarang praktik spekulatif atau *maysir* yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak. Dengan menghapus elemen-elemen yang bersifat eksploitatif, sistem keuangan syariah berupaya menciptakan tatanan ekonomi yang stabil, etis, dan berkeadilan sosial, di mana keuntungan diperoleh melalui aktivitas produktif dan berbasis nilai kemaslahatan.

Prinsip-prinsip dasar ini memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*), yang menekankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keuangan syariah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan finansial, tetapi juga pada tanggung jawab sosial serta pelestarian sumber daya alam. Dalam hal ini, Islam memandang manusia sebagai *khalifah* di bumi yang memiliki mandat untuk mengelola harta dan sumber daya dengan bijaksana, adil, dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, sistem keuangan syariah dapat dikatakan sebagai model keuangan berkelanjutan yang secara inheren telah mengintegrasikan dimensi etika, sosial, dan lingkungan dalam praktiknya jauh sebelum konsep keberlanjutan menjadi tren global.

Dalam konteks manajemen pembiayaan, penerapan prinsip syariah memiliki implikasi yang signifikan terhadap tata kelola dan kebijakan investasi bank. Setiap keputusan pembiayaan harus melewati proses analisis yang tidak hanya menilai potensi keuntungan finansial, tetapi juga dampak sosial dan ekologis yang ditimbulkan. Misalnya, pembiayaan tidak boleh disalurkan pada sektor yang merusak lingkungan, menimbulkan eksploitasi manusia, atau bertentangan dengan nilai moral. Pendekatan ini menuntut bank syariah untuk lebih selektif dan bertanggung jawab dalam menyalurkan dana, serta memastikan bahwa setiap proyek yang dibiayai membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan alam. Keseimbangan antara *profit*, *people*, dan *planet* menjadi landasan penting bagi keberlanjutan sistem keuangan Islam. Prinsip ini mendorong terwujudnya model bisnis yang tidak semata mengejar laba, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan sosial dan pelestarian lingkungan. Dalam praktiknya, hal ini dapat diwujudkan melalui pembiayaan sektor-sektor produktif seperti pertanian berkelanjutan, energi terbarukan, dan usaha mikro yang memberdayakan masyarakat kecil. Dengan demikian, keuangan syariah berpotensi besar menjadi katalis bagi ekonomi hijau dan inklusif yang lebih adil.

Secara kritis, tantangan yang dihadapi sistem keuangan syariah dalam mengimplementasikan prinsip keberlanjutan adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara idealisme etika dan tuntutan efisiensi ekonomi. Di satu sisi, bank syariah harus tetap kompetitif dalam pasar keuangan global yang didominasi oleh sistem konvensional; di sisi lain, mereka harus konsisten dalam menjaga nilai-nilai syariah dan keberlanjutan. Diperlukan inovasi kebijakan, transparansi tata kelola, serta integrasi teknologi digital untuk memastikan bahwa praktik keuangan syariah tidak hanya sesuai dengan hukum Islam, tetapi juga relevan dengan tantangan ekonomi modern seperti krisis iklim dan ketimpangan sosial. Dengan mengedepankan keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial, keuangan syariah dapat berperan lebih besar dalam menciptakan sistem ekonomi global yang beretika dan manusiawi. Dalam jangka panjang, sinergi antara nilai-nilai Islam dan konsep keberlanjutan dapat menjadi fondasi bagi terciptanya tatanan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga memberikan kesejahteraan spiritual dan ekologis bagi seluruh umat manusia. (Waharini, 2020)

Bank Syariah dan SDG

Bank syariah memiliki posisi strategis dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang digagas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Melalui prinsip-prinsip dasarnya seperti keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial, bank syariah mampu menjadi katalis penting dalam menciptakan sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada kemaslahatan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Dengan kata lain, sistem keuangan syariah menawarkan paradigma pembangunan ekonomi yang berakar pada nilai moral dan spiritual, sekaligus menjawab tantangan global terkait ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan degradasi lingkungan. Konsep pembangunan berkelanjutan dalam perspektif Islam tidak hanya dipahami sebagai agenda ekonomi jangka panjang, melainkan sebagai bagian integral dari amanah manusia sebagai khalifah di bumi. Hal ini berarti bahwa seluruh aktivitas ekonomi, termasuk pembiayaan dan investasi, harus diarahkan untuk mencapai kesejahteraan bersama tanpa merusak keseimbangan alam. Dalam konteks ini, bank syariah memegang peran penting sebagai lembaga intermediasi keuangan yang dapat mengarahkan aliran dana masyarakat menuju kegiatan produktif yang halal, bermanfaat, dan berdampak sosial positif. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai *maqasid al-shariah* melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta bank syariah dapat menjadi motor penggerak pembangunan yang menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia, bukan hanya aspek material semata.

Salah satu kontribusi paling signifikan dari bank syariah terhadap pencapaian SDGs terletak pada sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan mikro dan usaha kecil menengah. Skema seperti *mudharabah* dan *musyarakah* memberikan alternatif pembiayaan yang adil, di mana bank dan nasabah berbagi risiko dan keuntungan berdasarkan prinsip kemitraan. Dengan model ini, masyarakat berpenghasilan rendah

memiliki kesempatan untuk mengakses modal tanpa beban bunga yang menjerat, sekaligus memperoleh pendampingan dalam mengelola usaha. Secara sosial, hal ini berimplikasi pada peningkatan kemandirian ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pengurangan kesenjangan pendapatan antarwilayah. Di daerah pedesaan, peran bank syariah bahkan dapat menjadi katalis transformasi sosial, karena kehadirannya tidak hanya membawa akses modal, tetapi juga nilai etika dan spiritualitas dalam berbisnis. Namun, untuk benar-benar menjadi instrumen efektif dalam mencapai SDGs, bank syariah tidak cukup hanya menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif. Diperlukan paradigma baru yang mengintegrasikan keberlanjutan (*sustainability integration*) ke dalam kebijakan bisnis dan pengambilan keputusan keuangan.

Misalnya, dalam menilai kelayakan pembiayaan, bank syariah harus mempertimbangkan tidak hanya aspek profitabilitas, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan dari proyek yang dibiayai. Prinsip ini dikenal dengan konsep *triple bottom line* profit, people, and planet yang selaras dengan ajaran Islam tentang keseimbangan (*mizan*) dan tanggung jawab terhadap ciptaan Tuhan. Dengan demikian, bank syariah dapat memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan bersifat inklusif, adil, dan berkelanjutan. Selain peran sosial dan ekonomi, bank syariah juga memiliki potensi besar dalam mendukung agenda lingkungan global. Melalui instrumen seperti *green sukuk* dan *social impact financing*, lembaga keuangan syariah dapat membiayai proyek-proyek berorientasi lingkungan seperti pengembangan energi terbarukan, pengelolaan limbah, reboisasi, dan konservasi sumber daya alam. Pendekatan ini memperkuat posisi bank syariah sebagai lembaga yang tidak hanya mendukung pembangunan ekonomi, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga keseimbangan ekologi. Lebih jauh lagi, bank syariah dapat memanfaatkan prinsip *risk sharing* dalam akad syariah untuk mengurangi ketergantungan terhadap sistem keuangan berbasis spekulasi yang cenderung memperburuk krisis ekonomi dan lingkungan global.

Namun, idealisme ini menghadapi sejumlah tantangan struktural dan operasional. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan kapasitas internal bank syariah dalam menerapkan pembiayaan berkelanjutan. Banyak bank syariah yang masih berfokus pada produk berbasis jual beli seperti *murabahah*, yang meskipun aman secara finansial, kurang memberikan dampak langsung terhadap pemberdayaan sektor riil dan pencapaian SDGs. Selain itu, masih minimnya inovasi produk keuangan syariah yang dirancang secara eksplisit untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan menjadi kendala yang perlu segera diatasi. Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi yang lebih erat antara bank syariah, pemerintah, lembaga internasional, dan sektor swasta dalam mengembangkan instrumen keuangan yang berorientasi sosial dan ramah lingkungan. Dari perspektif kebijakan publik, pemerintah perlu memberikan dukungan konkret melalui insentif fiskal dan regulasi yang kondusif bagi pertumbuhan keuangan syariah berkelanjutan. Misalnya, pemberian potongan pajak untuk proyek *green financing* atau *social enterprise financing* berbasis syariah, serta penyusunan panduan keberlanjutan yang disesuaikan dengan

prinsip syariah. Di sisi lain, peningkatan literasi keuangan masyarakat juga sangat penting. Rendahnya pemahaman terhadap prinsip syariah dan tujuan keberlanjutan menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya memanfaatkan layanan keuangan syariah. Oleh karena itu, bank syariah perlu aktif dalam melakukan edukasi publik yang tidak hanya menekankan aspek religius, tetapi juga manfaat sosial dan lingkungan dari produk-produk keuangan syariah.

Dari sisi etika bisnis, bank syariah juga harus lebih kritis dalam meninjau praktik operasionalnya. Prinsip tanggung jawab sosial tidak boleh berhenti pada tataran simbolik atau formalitas kepatuhan syariah semata, melainkan harus diwujudkan dalam setiap aspek kegiatan operasional, mulai dari seleksi nasabah, investasi portofolio, hingga strategi pemasaran. Penguatan tata kelola (*Islamic corporate governance*) menjadi kunci dalam memastikan bahwa nilai-nilai keadilan dan transparansi benar-benar terimplementasi dalam sistem keuangan syariah. Secara keseluruhan, keberadaan bank syariah bukan sekadar alternatif dari sistem keuangan konvensional, melainkan representasi dari paradigma ekonomi yang lebih beretika, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Dengan memadukan nilai-nilai spiritualitas Islam dan prinsip keberlanjutan global, bank syariah dapat menjadi kekuatan pendorong transformasi ekonomi menuju arah yang lebih inklusif dan ramah lingkungan. Melalui kolaborasi lintas sektor, inovasi produk berkelanjutan, serta penguatan kapasitas kelembagaan, bank syariah berpotensi memainkan peran sentral dalam membangun peradaban ekonomi yang bukan hanya maju secara material, tetapi juga bermartabat dan berkeadilan sosial. (Dewi, 2023)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis data sekunder. Sumber data terdiri dari jurnal ilmiah, laporan keberlanjutan Bank Syariah Indonesia, regulasi OJK mengenai pembiayaan berkelanjutan, serta data emisi karbon nasional. Metode ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana manajemen pembiayaan syariah diterapkan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Analisis dilakukan melalui pengelompokan temuan ke dalam tiga aspek utama yaitu implementasi pembiayaan, kontribusi terhadap SDGs, dan tantangan serta strategi penguatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah telah mengintegrasikan prinsip keberlanjutan melalui evaluasi dampak lingkungan, pembiayaan hijau, inovasi digital, dan penguatan tata kelola syariah. Data menunjukkan bahwa BSI menyalurkan Rp 41,91 triliun pembiayaan ramah lingkungan pada 2022 dan melakukan efisiensi energi melalui digitalisasi perbankan. Selain itu, tren intensitas emisi CO₂ Indonesia yang stabil pada kisaran 47–57 Mt menegaskan pentingnya peran bank syariah dalam mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon melalui instrumen pembiayaan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Manajemen Pembiayaan Bank Syariah dalam Mendukung Sektor Berkelanjutan

Manajemen pembiayaan bank syariah menuntut pengelolaan dana yang tidak sekadar mengejar keuntungan, namun juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Dalam konteks ini, Bank Syariah Indonesia (BSI) telah mengintegrasikan berbagai aspek keberlanjutan ke dalam kebijakan pembiayaannya. Salah satunya adalah penerapan Evaluasi Dampak Lingkungan (EDL) dan syarat AMDAL untuk proyek yang berisiko tinggi terhadap lingkungan. Kebijakan ini memastikan bahwa setiap pembiayaan diarahkan hanya kepada kegiatan yang tidak merusak alam dan selaras dengan prinsip syariah yang menekankan kemaslahatan.

BSI juga menerapkan sistem *paperless banking*, seperti mobile banking, e-statement, dan pembukaan rekening digital, untuk mengurangi penggunaan kertas dan mengoptimalkan proses pembiayaan. Langkah ini tidak hanya mengurangi biaya operasional, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan jejak karbon perbankan. Dengan kombinasi kebijakan internal dan pendekatan teknologi tersebut, manajemen pembiayaan BSI menjadi lebih adaptif terhadap tuntutan pembangunan berkelanjutan.

Peran Pembiayaan Syariah dalam Mendorong Triple Bottom Line (Profit, People, Planet)

Pembiayaan syariah secara inheren mendukung kerangka *triple bottom line* karena akad-akad syariah mengandung unsur keadilan, kemitraan, dan keberlanjutan. Profit tercermin dari penyaluran pembiayaan pada sektor produktif seperti pertanian, perdagangan, dan energi bersih. Pembiayaan ini mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. BSI tercatat telah meningkatkan alokasi pembiayaan berkelanjutan pada sektor-sektor yang memiliki dampak ekonomi positif. People atau aspek sosial tampak dari konsistensi pembiayaan UMKM dan mikro yang bebas riba dan bersifat lebih adil. Pembiayaan ini membantu masyarakat kecil memperoleh modal tanpa beban bunga dan mendorong pemerataan kesejahteraan.

Planet atau aspek lingkungan diwujudkan melalui pembiayaan proyek energi terbarukan, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah. Prinsip-prinsip syariah yang melarang mudarat dan kerusakan lingkungan membuat pembiayaan syariah sangat relevan untuk mendukung keberlanjutan. BSI bahkan mewajibkan pemenuhan standar lingkungan bagi calon nasabah pembiayaan berskala besar. Dengan ketiga aspek tersebut, pembiayaan syariah mampu berperan sebagai pendorong pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Green Financing sebagai Instrumen Pembiayaan Berkelanjutan pada Bank Syariah

Green financing menjadi instrumen nyata dalam mewujudkan pembangunan rendah karbon. Data dari jurnal menunjukkan komitmen kuat BSI dalam menyalurkan pembiayaan hijau: Tahun 2022, pembiayaan ramah lingkungan mencapai Rp 41,91 triliun atau 24,70% dari total pembiayaan. Total pembiayaan berkelanjutan BSI pada tahun tersebut mencapai Rp 15,51 triliun. Pada 2023, total pembiayaan hijau mencapai Rp 2,6 triliun, dengan komposisi UMKM 66,8%* dan Non-UMKM 33,2%. BSI juga menerapkan strategi operasional seperti penggunaan panel surya, pengurangan energi listrik, efisiensi air, dan digitalisasi proses layanan sebagai bagian dari green banking. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa green financing tidak hanya berfokus pada pembiayaan, tetapi juga transformasi internal lembaga keuangan.

Jenis Pembiayaan	Nilai Pembiayaan	Persentase
Pembiayaan usaha ramah lingkungan	Rp 41,91 triliun	24,70%
Total pembiayaan berkelanjutan	Rp 15,51 triliun	-

Gambar 0.1 putri ismukhanah (hal. 11)

Tabel menunjukkan bahwa investasi BSI pada sektor ramah lingkungan sangat besar dan mencakup hampir seperempat portofolio pembiayaannya. Ini menunjukkan prioritas yang jelas terhadap sektor-sektor yang mendukung SDGs seperti energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan pengelolaan limbah.

Tren dan Data Pembangunan Berkelanjutan (2017–2023)

Tahun	Intensitas Emisi CO ₂
2017	47–57 juta ton
2018	47–57 juta ton
2019	47–57 juta ton
2020	47–57 juta ton
2021	47–57 juta ton

Gambar 0.1 putri ismukhanah (hal. 15)

Tabel tersebut menunjukkan intensitas emisi CO₂ Indonesia dari tahun 2017 hingga 2021 yang berada pada kisaran 47–57 juta ton setiap tahun. Data ini menggambarkan bahwa tingkat emisi karbon nasional relatif stabil selama lima tahun tersebut, karena tidak

terlihat adanya peningkatan maupun penurunan yang signifikan. Penggunaan rentang angka 47–57 juta ton menunjukkan bahwa data yang ditampilkan merupakan estimasi atau kisaran yang menggambarkan fluktuasi emisi dalam rentang tersebut, bukan angka pasti untuk setiap tahunnya. Stabilitasnya intensitas emisi selama periode ini menunjukkan bahwa berbagai upaya pengurangan emisi yang dilakukan pemerintah dan sektor industri belum menghasilkan penurunan yang berarti, atau dapat pula menunjukkan bahwa pertumbuhan aktivitas ekonomi yang berpotensi meningkatkan emisi berhasil ditekan sehingga tidak menyebabkan lonjakan signifikan.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, khususnya terkait SDG 13 tentang penanganan perubahan iklim, data ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki tantangan besar untuk menurunkan emisi karbon secara lebih agresif. Kondisi ini juga memiliki relevansi dengan sektor keuangan, termasuk bank syariah, karena pembiayaan yang diarahkan pada proyek-proyek hijau, energi terbarukan, dan efisiensi energi sangat diperlukan untuk membantu menurunkan intensitas emisi nasional. Dengan demikian, tabel tersebut dapat digunakan sebagai dasar argumentasi bahwa peran lembaga keuangan, termasuk bank syariah, sangat penting dalam mendukung upaya pengurangan emisi melalui instrumen pembiayaan berkelanjutan.

Kontribusi Manajemen Pembiayaan Bank Syariah terhadap SDGs

Manajemen pembiayaan bank syariah memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui pengelolaan dana yang diarahkan kepada sektor-sektor produktif, etis, dan ramah lingkungan. Pembiayaan syariah yang berlandaskan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial mendorong terciptanya aktivitas ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Instrumen pembiayaan syariah seperti sukuk hijau dan pembiayaan berbasis bagi hasil memungkinkan penyaluran dana untuk proyek-proyek energi terbarukan, pengelolaan limbah, transportasi berkelanjutan, dan mitigasi perubahan iklim, yang selaras dengan SDG 7, SDG 11, SDG 12, dan SDG 13.

Selain itu, manajemen pembiayaan bank syariah turut mendukung inklusi keuangan dan pengentasan kemiskinan melalui pembiayaan UMKM yang memperkuat sektor riil dan meningkatkan produktivitas masyarakat, sesuai dengan SDG 1 dan SDG 8. Pengelolaan pembiayaan yang memperhatikan prinsip maqashid syariah, seperti menjaga harta, jiwa, dan keberlanjutan generasi, memastikan bahwa setiap proyek yang dibiayai membawa manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, manajemen pembiayaan bank syariah berperan sebagai motor penggerak pembangunan berkelanjutan melalui alokasi dana yang etis, produktif, dan berwawasan lingkungan, yang secara langsung mendukung tercapainya tujuan-tujuan pembangunan global. (Alifa, 2023)

Tantangan Implementasi Pembiayaan Berkelanjutan pada Bank Syariah

Penerapan pembiayaan berkelanjutan menghadapi tantangan di level internal maupun eksternal. Secara internal, kapasitas SDM masih perlu ditingkatkan dalam memahami analisis risiko lingkungan dan sosial. Banyak pegawai lebih fokus pada kepatuhan syariah teknis, sementara pemahaman mengenai ESG dan evaluasi dampak lingkungan belum merata. Tantangan lain muncul karena inovasi produk pembiayaan hijau syariah masih terbatas. Produk pembiayaan bank syariah cenderung terpusat pada murabahah, yang aman namun kurang mendukung sektor hijau secara signifikan. Selain itu, literasi masyarakat terhadap pentingnya pembiayaan hijau masih rendah, sehingga permintaan terhadap produk berkelanjutan belum optimal. Dari sisi operasional, beberapa aspek seperti pengelolaan energi, limbah, dan pemanfaatan teknologi hijau di kantor cabang masih perlu diperkuat. Minimnya insentif pemerintah, dukungan regulasi, serta kolaborasi lintas sektor juga menjadi hambatan bagi bank syariah untuk memperluas portofolio pembiayaan berkelanjutan secara lebih agresif.

Strategi Penguatan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah dalam Mendorong Pembangunan Berkelanjutan

1. Integrasi Nilai Maqasid Syariah dengan Prinsip ESG

Salah satu strategi utama yang dapat ditempuh adalah menyatukan nilai-nilai maqasid syariah dengan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Dalam hal ini, maqasid syariah dapat berfungsi sebagai kerangka etik, sementara ESG menjadi panduan praktis untuk mengukur kinerja keberlanjutan. Penerapan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam pembiayaan akan memperkuat dimensi etika dari ESG. Misalnya, pembiayaan kepada sektor energi terbarukan dan pertanian berkelanjutan dapat dikategorikan sebagai implementasi *hifdz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan).

2. Penguatan Kebijakan dan Insentif

Pemerintah dan otoritas keuangan perlu memperkuat kerangka regulasi yang mendukung pembiayaan berkelanjutan di bank syariah. Rekomendasi strategis mencakup:

- a. Penyusunan standar nasional pembiayaan hijau syariah, agar bank memiliki pedoman yang seragam.
- b. Pemberian insentif pajak atau penjaminan risiko untuk pembiayaan proyek sosial-lingkungan.
- c. Integrasi indikator maqasid syariah dalam *Sustainability Report* bank syariah agar kinerja sosial dapat diukur secara objektif. Dengan adanya dukungan kebijakan tersebut, perbankan syariah dapat lebih aktif dalam mendanai proyek-proyek pembangunan yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat.

3. Penguatan Literasi dan Edukasi Keuangan Syariah

Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan syariah menjadi hambatan besar dalam perluasan akses. Inklusi keuangan syariah di daerah terpencil masih rendah akibat minimnya sosialisasi dan keterbatasan infrastruktur. Oleh karena itu, edukasi publik dan literasi keuangan berbasis

digital perlu diperluas. Kolaborasi antara bank syariah, perguruan tinggi, dan lembaga zakat/wakaf dapat menjadi solusi konkret dalam memperluas pemahaman masyarakat mengenai manfaat pembiayaan syariah.

4. Digitalisasi Pembiayaan Syariah

Transformasi digital menjadi prasyarat penting bagi efisiensi dan transparansi. Penerapan teknologi blockchain dapat memperkuat sistem pelaporan dan audit dalam proyek pembiayaan, sementara artificial intelligence (AI) dapat membantu menganalisis kelayakan proyek berdasarkan kriteria sosial dan lingkungan. Dengan digitalisasi, layanan pembiayaan syariah dapat menjangkau wilayah terpencil tanpa harus membuka cabang fisik, digitalisasi keuangan syariah berpotensi memperluas inklusi keuangan nasional hingga 90% pada 2030.

5. Kolaborasi Multi-Pihak (*Multi-Stakeholder Collaboration*)

Pembangunan berkelanjutan tidak bisa dicapai hanya oleh sektor perbankan. Diperlukan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, lembaga keuangan, pelaku bisnis, dan masyarakat sipil. Pentingnya konsep *Creating Shared Value (CSV)*, yaitu strategi bisnis yang menempatkan keberlanjutan sebagai inti nilai ekonomi. Dalam konteks perbankan syariah, CSV dapat diimplementasikan melalui program pembiayaan berbasis kemitraan sosial, seperti *social entrepreneurship financing* dan *community-based microfinance*. (Khan, 2020)

Dampak Implementasi Manajemen Pembiayaan Syariah terhadap Pembangunan Berkelanjutan

1. Dampak Ekonomi

Manajemen pembiayaan yang sehat meningkatkan stabilitas keuangan dan menyalurkan dana ke sektor produktif. Model bagi hasil menciptakan sistem ekonomi yang tidak spekulatif serta mendukung pengentasan kemiskinan. Studi OJK (2024) menunjukkan bahwa pertumbuhan aset perbankan syariah mencapai 15,6% per tahun, dengan kontribusi signifikan terhadap pembiayaan UMKM dan sektor riil.

2. Dampak Sosial

Pembiayaan syariah berbasis tanggung jawab sosial (seperti zakat, infak, dan wakaf produktif) meningkatkan kesejahteraan komunitas dan memperkecil kesenjangan pendapatan. Konsep *qardhul hasan* menjadi bukti nyata bahwa keuangan Islam dapat menggabungkan nilai solidaritas sosial dengan efisiensi ekonomi.

3. Dampak Lingkungan

Implementasi pembiayaan berkelanjutan seperti green sukuk dan investasi hijau menunjukkan kontribusi nyata perbankan syariah dalam mitigasi perubahan iklim. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (2023), proyek-proyek yang didanai melalui green sukuk berhasil menurunkan emisi karbon hingga 12,4 juta ton CO per tahun. Secara keseluruhan, sinergi antara nilai-nilai Islam dan prinsip

keberlanjutan menciptakan model pembangunan yang holistik mencakup aspek spiritual, sosial, dan ekologis. ((OJK), 2023)

KESIMPULAN

Manajemen pembiayaan bank syariah memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan melalui integrasi prinsip syariah, kemaslahatan sosial, dan tanggung jawab lingkungan. Pembiayaan yang diarahkan pada sektor produktif, inklusif, dan ramah lingkungan mampu mendukung triple bottom line yang meliputi profit, people, dan planet. Implementasi green financing, evaluasi dampak lingkungan, serta transformasi digital menunjukkan bahwa bank syariah mulai berkontribusi secara nyata terhadap pencapaian SDGs, khususnya terkait energi bersih, pertumbuhan ekonomi inklusif, konsumsi-produksi berkelanjutan, dan mitigasi perubahan iklim.

Meskipun demikian, berbagai tantangan seperti keterbatasan SDM, dominasi produk non-hijau, rendahnya literasi pembiayaan berkelanjutan, dan dukungan regulasi yang belum optimal masih perlu diatasi. Penguatan kapasitas kelembagaan, integrasi maqasid syariah dengan prinsip ESG, serta peningkatan kolaborasi lintas sektor menjadi langkah strategis untuk memperkuat peran bank syariah dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan optimalisasi manajemen pembiayaan, bank syariah memiliki potensi besar menjadi motor transformasi ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan ramah lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- (OJK), O. J. (2023). *Statistik Perbankan Syariah dan Laporan Keuangan Berkelanjuta*. Jakarta: OJK.
- Alifa, P. I. (2023). OPTIMALIZATION OF GREEN SUKUK AS AN EFFORT TO DEVELOP . *Majapahit Journal Islamic Finance And Management*, 69-88.
- Antonio, M. S. (2020). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Dewi, S. Y. (2023). PerPeran Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Tax and Business Journa*, 229–241.
- Dusuki, A. W. (2020). Maqasid al-Shariah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 25–45.
- Indonesia, K. K. (2023). *Green Sukuk Allocation and Impact Report 2023*. Jakarta:Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Green Sukuk Allocation and Impact Report*. Jakarta: Direktorat Pembiayaan Syariah.
- Khan, M. (2020). Islamic Finance and Sustainable Development Goals: A Synergistic Approach. *Journal of Islamic Economics*, 101–118.
- Lestari, W. P. (2024). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Akses Keuangan pada Daerah Terpenci. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (JEB)*, 269–275.

- Ramadhan, F. &. (2020). Islamic Microfinance and Financial Inclusion. *Journal of Islamic Economic*, 33–48.
- Sofiyana, M. (2025). Analisis Peran Manajemen Keuangan Syariah dalam Mendorong Keuangan Berkelanjutan. *AT-TAJIR: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 57–73.
- Waharini, F. M. (2020). Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia. *Jurnal Halal Studies*, 23–35.
- Yusuf, A. (2024). Strategi Penguatan SDM dalam Pengelolaan Pembiayaan Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 56–72.